

Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)**Fernando Eugenio Rugian¹⁾, Burhan Niode²⁾, Trilke Erita Tulung³⁾***^{1),2)} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Bahu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara**Email : rugianfernando@gmail.com¹⁾, burhanniode@unsrat.ac.id²⁾, trilketulung70@gmail.com³⁾***ABSTRACT**

This paper aims to explain the dynamics political in Myanmar in 2021 will lead to the transfer of power in Myanmar. This research method uses an article review obtained through library research. The results of this paper indicate that Myanmar cannot build a democratic system without trust between civilians and the military, leading to the diversion of the military. During British rule, elections were actually held three times between 1951 and January 1952. Myanmar experienced civilian rule from 1948 to 1958, from 1960 to the following decade when the government was ruled by the army. Myanmar held several elections, and in 1990 the National League for Democracy won the election, but lost to the army and refused to accept victory over the National League for Democracy. In 2021, it will be the same as in 1990, when the military refuses to concede victory. However, when the military shifts power away from civilians, Myanmar's dark past repeats itself and military control becomes paramount. Without this control, the transition from a non-democratic regime to a more democratic one cannot be accompanied by a change in the military environment. However, according to Myanmar's 2008 Constitution, the military occupies 25% of parliament's seats. So that 75% of parliamentary decisions, the military took part in granting their rights. According to Myanmar's history, the military has taken up its political role and is constantly involved and has a strong influence in Myanmar's politics which cannot be separated. Seeing the development of the case of the takeover of power by the Junta, it seems that it will be difficult for the people to regain the power of the elected government, the public's condemnation of the violence that occurred seems to mean nothing.

Keywords : *Democracy, Military, Myanmar, Civil*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan di Myanmar. Metode penelitian ini menggunakan review artikel yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang mana tidak ada kepercayaan antara sipil maupun militer yang mengakibatkan pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak militer. Padahal pada saat Inggris menjajah, praktek pemilihan umum sebenarnya dilakukan tiga kali di antara tahun 1951 dan Januari 1952. Myanmar mengalami pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan dihitung dari tahun 1960 hingga dekade selanjutnya pemerintahan telah dipegang oleh militer. Myanmar beberapa kali mengadakan pemilihan umum, di tahun 1990 yang mana partai Nasional Liga untuk demokrasi menang dalam pemilihan namun ditolak oleh militer dan tidak mau mengakui kemenangan atas partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Hingga di tahun 2021, sama halnya dengan tahun 1990 yang mana militer menolak dan tidak mengakui hasil kemenangan. Akan tetapi, militer mengalihkan kekuasaan dari sipil sehingga masa kelam Myanmar kembali terulang kembali. Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Namun, menurut konstitusi menurut konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mendapatkan kursi parlemen sebanyak 25%. Sehingga 75% keputusan parlemen militer turut andil dalam memberikan hak suaranya. menurut sejarah Myanmar, militer sudah mengambil peran politiknya dan terlibat secara terus-menerus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Myanmar yang tidak bisa dipisahkan. Melihat perkembangan kasus pengambilalihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa-apa.

Kata Kunci : *Demokrasi, Militer, Myanmar, Sipil*

1. Pendahuluan

Pengembangan dinamika demokrasi di suatu negara merupakan urusan dalam negeri yang bersangkutan, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi seperti hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi adalah bagian dari isu internasional. Maka, hal ini akan mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Myanmar merupakan negara yang masih menjadi sorotan dunia internasional akibat dari perkembangan politik yang terjadi. Sistem politik atau pemerintahan negara terdapat berbagai jenis baik bentuk demokrasi, presidensial, otoritarian dan sebagainya. Dalam suatu pemerintahan tidak hanya mengenai pemerintah dan rakyat, tetapi didalamnya ada hubungan antara sipil dan militer. Huntington menyatakan ada bentuk hubungan sipil-militer yang ideal yaitu “kontrol sipil obyektif” atas militer dimana sipil memiliki supremasi atas militer memberikan profesionalisme militer untuk tetap independen terkait ruang lingkup militer.

Burma atau yang dikenal saat ini Myanmar mengalami pemerintahan sipil sejak kemerdekaan di tahun 1948-1958 dan dari 1960, sehingga selain dekade tersebut pemerintahan dikuasai oleh kubu militer. (Republika Online, 2021). Di tahun 1948 di bawah pemerintahan U Nu, ia mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan sistem parlementer namun sebagaimana negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu diperhadapkan dengan keadaan sosio-politik yang rumit. Keterlibatan militer dimulai ketika jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikan keterlibatan dan mempersiapkan pemilu di tahun 1960. Militer berhasil memulihkan keadaan sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh partai U Nu yaitu *Union Party*. Keberhasilan kudeta atas PM U Nu pada tahun 1962 bisa dikatakan sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahan Ne Win hanya mengakui satu partai yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang anggotanya didominasi oleh militer dan menjadi pilar pokok dari partai (Firnans, 2003). Pada Bulan Juli 1971, Junta militer mengumumkan untuk menyusun konstitusi baru dan mengadakan pemilihan umum dan berjanji akan dialihkan ke pemerintahan sipil setelah pemilihan umum. Pada pemilihan umum 1974 diadakan pemilihan pertama sesuai dengan konstitusi berlaku dan pemerintahan militer Ne Win. Di tahun itu berakhirnya pemerintahan militer dan awal fase kediktatoran konstitusional militer (Devi, 2014).

Secara umum, politik militer dapat diartikan sebagai “keterlibatan secara sengaja dan substansial dalam proses pembuatan dan pengalokasian kekuasaan dan nilai politik, sosial, dan ekonomi. Dengan kata lain, dapat diartikan politik militer secara sempit sebagai penugasan kursi pemerintahan (biasanya melalui cara kudeta), sedangkan secara luas, politik militer dapat dilihat sebagai pengaruh “tidak resmi” tentara dalam proses politik dan pembuatan kebijakan negara. Dilihat dari dua lensa besar, ini akan bergantung pada esensi

hubungan sipil militer di negara tersebut, yakni interaksi strategis antara pemimpin politik dan pemimpin militer yang berevolusi sepanjang sejarah (Gunawan, 2017). Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Yang pada mulanya muncul pertanyaan sebagai *who guards the guardian* pada akhirnya berubah menjadi *how to control the guardian* (Kardi, 2014). Lebih dari itu, hal ini diperlukan karena perubahan rezim, khususnya akibat konstelasi politik tertentu, tidak menjamin kelangsungan nilai-nilai demokratis (Sarvas 1988), Selama satu dekade lebih, banyaknya aksi di berbagai tempat sebagai kekecewaan rakyat tentunya kebijakan pemerintah tidak dapat mengembalikan keadaan yang berujung dari aksi protes. Seruan demo besar pada tanggal 8 Agustus 1988 yang dikenal dengan “888 *Uprising*”. Militer memang berhasil menghentikan protes dan demonstrasi. Namun, mereka tak dapat membengkokkan dengan seruan yang terus berkembang untuk demokrasi. Pada tahun 1990 diputuskannya pemilu yang diikuti kurang lebih 200 partai yang melakukan registrasi termasuk partai oposisi Partai Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi hingga berhasil memperoleh dukungan dari rakyat. Ini sebuah perubahan dan kebebasan demokrasi bagi rakyat. Militer menolak dan memberikan hukuman kepada anggota partai termasuk Aun San Suu Kyi. Pembatalan pemilu tahun 1990 di Myanmar menjadi isu internasional dan mendapat kecaman dari banyak pihak. Pemilu yang hanya menjadi “*test case*” terhadap masyarakat, langsung diboikot begitu saja. Perjuangan masyarakat Myanmar untuk bisa secara utuh menerapkan demokrasi tentunya tidak muda dan memakan waktu yang sangat lama ditumpahi darah dan memakan banyak korban. semangat dan kehadiran dari demokrasi dapat terlihat pada masyarakat yang memegang prinsip-prinsip, sebab demokrasi merupakan produk langsung dari seluruh warganya, tidak ada satupun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-cita menjadi kenyataan. Di tahun 2011, pemerintah membatasi pengaruh dari eksternal akan tetapi dengan adanya transisi di Myanmar Asia mampu mempengaruhi laju transisi dan pengaruh eksternal yang positif. Di tahun 2015, Myanmar mengadakan pemilihan nasional dan merupakan jajak pendapat pertama yang diadakan sejak proses reformasi, di bawah semi-sipil dan sebuah ujian kritis bagi Myanmar Penyelenggara pemilu relatif baru, dimana budaya demokrasi perlu diasah.

Di akhir tahun 2020 myanmar menggelar kembali demokrasi di tengah pandemi Covid-19 berkecamuk. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengklaim kemenangan segera setelah pemungutan suara dan memprediksi memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Pada 1 Februari, militer melancarkan kudeta dan menahan Aung San Suu ky, Presiden Win Myint dan senior pemimpin pemerintahan lainnya. Dan di ikuti deklarasi setahun oleh Min Aung Hlaing yang mengambil kekuasaan di

Myanmar. Faktor pengambilalihan oleh militer akibat dari kemenangan Partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Ketegangan dipicu oleh adanya manipulasi melalui “penipuan” dan “penyimpangan”. Sehingga militer mengharapkan kemenangan di Pemilu 2020. Dalam hal ini, kudeta yang dilakukan oleh militer belum mampu untuk melaksanakan sistem demokrasi yang adil. Hingga militer meragukan atau percaya terhadap kemampuan sipil yang bertolak belakang dengan militer.

Kajian mengenai demokrasi di Myanmar pernah dilakukan dengan judul “Peran dan Upaya Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar (Studi : dari masa kekuasaan Junta Militer 1988 hingga tahun 2012)” oleh Batubara (2017) yang mana mendeskripsikan kondisi negara Myanmar pada masa kekuasaan junta militer dengan menganalisis upaya Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan penegakkan militer dari tahun 1988 sampai 2012 . Sedangkan, kajian penulisan ini membahas tentang dinamika demokrasi yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan (kembali) kekuasaan oleh pihak militer. Dimulai dari latar belakang demokrasi yang terjadi di Myanmar, peran militer yang melekat terhadap sistem politik Myanmar serta bagaimana demokrasi yang terjadi di Myanmar melalui Pemilihan Umum sehingga mengakibatkan kekacauan politik yang ditangani oleh militer sendiri.

Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai dinamika demokrasi yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan oleh pihak militer. Untuk menjawab tujuan penelitian , maka digunakan teori hubungan sipil militer yang mana menurut Samuel P. Huntington, (1957 dikutip dari Devi, 2014) menyatakan bahwa kontrol sipil (*civilian control*) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relatif sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif maupun objektif sipil. Dalam konseptual terhadap kontrol sipil-militer merujuk pada kemampuan elite sipil yang terpilih secara demokratis untuk melaksanakan segala kebijakan negara tanpa intervensi dari pihak militer (Agüero 1995; Trinkunas 2001, dikutip dari Gunawan, 2017).

Disamping itu penulis menggunakan teori demokrasi yang sebagaimana di oleh Robert A. Dahl (1998, dikutip dari Kusni, 2009) demokrasi adalah “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat”. Definisi dan kriteria mengenai demokrasi telah diterapkan oleh berbagai negara, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu , studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan

normatifnya. Peneliti menganggap penting untuk dikaji dikarenakan permasalahan ini masih akan terus berlanjut hingga adanya kepercayaan militer terhadap pemerintahan sipil. Teori yang digunakan Hubungan sipil –militer Myanmar dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis masalah yang terjadi di Myanmar,. Permasalahan ini, seringkali terjadi di negara berkembang salah satunya Myanmar, sehingga posisi pemerintahan diduduki oleh militer.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Nazir (1988, dikutip dari Milya, 2020), penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

2. Hasil & Pembahasan

SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI MYANMAR

Mulainya demokrasi di Myanmar berawal dari penerapan sistem demokrasi setelah selama 14 tahun kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada 2 Maret 1962. Pada pelaksanaan proses konsolidasi di Myanmar terganggu, saat militer memegang kekuasaan dalam politik di Myanmar. Pemerintahan militer menanggalkan era baru dalam sistem politik Myanmar. Ketika Myanmar diperintah oleh kekuatan militer yang mempraktekkan sistem sosialis. Dengan adanya peristiwa pada tahun 1962, Myanmar memaksakan diri untuk menutup pintu terhadap dunia internasional dan kebijakan isolasi yang diberlakukan untuk Myanmar dari seluruh dunia. Rakyat Myanmar tak tinggal diam dengan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menerapkan sistem pemilihan terbuka yang disebut demokratisasi Myanmar pada tahun 1990. Oleh karena itu, pada tahun 1990 diadakannya pemilihan dengan berbagai partai melalui proses demokrasi. Dalam pemilihan ini, kelompok rakyat yang dikenal sebagai Liga Nasional Demokrasi (NLD) dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan ini dengan memperebutkan mayoritas suara Asia Tenggara.

Pada waktu Inggris menjajah di Myanmar, pemilihan umum telah diadakan dengan adanya pemilihan dewan legislatif pertama kali pada 21 November 1922, dan pemilihan umum diadakan sebentar pada tahun 1925, 1928, 1932 dan 1936. Pasal 233 Konstitusi 1947 menyatakan: “Pemilihan umum pertama berdasarkan Konstitusi ini akan diadakan dalam waktu 18 bulan sejak tanggal mulai berlakunya Konstitusi ini”. Tetapi dengan perang saudara yang datang bersamaan dengan kemerdekaan, pemilihan umum diadakan tiga kali antara tahun 1951 dan Januari 1952.

Demokrasi di Myanmar sebenarnya dianggap mengalami kebekuan atau stagnan yang terdapat pada penerapan demokrasi seperti dalam pemilihan umum yang diadakan. semangat demokrasi yang seharusnya tampak dalam memberikan kebebasan serta peran utama

kepada pihak sipil menjadi tidak ada. . Kekuasaan yang diambil oleh junta terhadap pihak sipil, menjadikan militer sebagai nahkoda dalam pengendalian sistem pemerintahan. masyarakat sipil terus berupaya untuk mewujudkan demokrasi melalui supremasi sipil namun mengalami penekanan yang sangat luar biasa oleh militer. Sejak militer memegang pemerintahan di Myanmar tahun 1962 ada banyak hal yang terjadi sehingga hal-hal yang terjadi di masa lampau akan dialami masyarakat Myanmar pada saat ini. Bagaimana militer menekankan para aktivitas politik oposisi, sehingga junta militer lebih leluasa dalam menguasai pemerintahan. Ada batasan yang dibatasi oleh pemerintah junta militer salah satunya yaitu akses internet dan hubungan dunia internasional sehingga masyarakat Myanmar terkontrol sepenuhnya oleh junta militer. Semua ini merupakan bagaimana rangkaian kebijakan junta militer yang ingin tetap melanggengkan kekuasaannya di bawah kontrol pemerintahan junta militer. kekuatan militer Myanmar yang sangat kuat pun mampu melakukan reformasi tersebut, semata demi mewujudkan negara yang demokratis. Upaya ini belum berdampak seluruhnya bagi pembangunan dalam negeri, namun hal ini telah menunjukkan di Myanmar. Namun saat ini pada intinya menjadi sebuah persaingan sengit antara kedua kelompok yaitu junta militer dan pihak sipil. Satu sisi lainnya yaitu ancaman bagi pemerintahan junta militer yaitu menguatnya kelompok oposisi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya kaum minoritas di Myanmar.

Di tahun 2015 setelah 25 tahun terakhir diadakannya pemilihan umum pertama setelah dikuasai militer. Sekitar 30 juta orang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum Myanmar. Terlepas dari tantangan besar, pemilihan ini berjalan dengan damai. Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional dari Demokrasi memenangkan pemilihan ini. Ekspektasi dan harapan tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintahan yang baru. Namun tantangan ini tentunya yang dihadapi Myanmar tentunya akan sama sulitnya dengan yang diatasi sebelumnya.

Di akhir tahun 2020 tepatnya pada tanggal 8 November 2021 Myanmar menggelar pesta demokrasi lebih dari 1,100 kursi federasi. Masyarakat ikut berpartisipasi walaupun diperhadapkan dengan lonjakan covid-19. Lebih dari 70% dari 37 Juta yang memenuhi memberikan hak suaranya. Komisi pemilihan umum mengumumkan NLD mengamankan 396 kursi dibandingkan dengan partai lainnya. Namun, disisi lain militer melancarkan aksinya dengan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 dan menguasai balai kota Yangon. Ini bukanlah pertama kali yang terjadi di Myanmar. Sangatlah penting untuk menganalisis bentuk demokrasi yang mungkin terjadi di masa depan dengan melihat pengalaman masa lalu. Isu-isu masalah internal tentunya menjadi penghambat bagi Myanmar dalam memprioritaskan dan menciptakan pemerintahan nasional yang inklusif.

PERAN MILITER DALAM POLITIK MYANMAR

Sejarah menyoroti bahwa militer sudah mengambil peran politiknya sejak kemerdekaan. Myanmar Tatmadaw jarang mengalami indoktrinasi dengan konsep profesionalisme militer dan kontrol sipil. Orientasi politik Tatmadaw tidak hanya menjadi tentara dengan citra sosial yang patriotik dan kurangnya indoktrinasi yang tepat tentang profesionalisme militer dan kontrol sipil tetapi juga situasi politik pada waktu kemerdekaan. Tatmadaw ditugaskan untuk terlibat secara terus-menerus dalam politik Myanmar dengan alasan stabilitas jangka panjang dan kesatuan militer baik sebagai pemerintah maupun institusi. Pada tahun 1962, perpecahan di antara elit politik, ketegangan antara partai yang berkuasa dan kelompok etnis membuka peluang untuk militer dalam campur tangan dalam politik.

Sejak pemerintahan militer baik pada era sosialis yang dipimpin oleh Ne Win maupun rezim SLORC pada akhir tahun 1980-an, Myanmar merupakan negara dengan bentuk junta militer yang mana kekuasaan berada di tangan yang dipimpin oleh dewan jenderal, maka jenderal yang menjadi pemimpin adalah Jenderal Senior. Peran militer dalam politik Myanmar terlihat dari adanya State Development and Peace Council (SPDC) yang dibentuk sejak tahun 1997, yang sebelumnya bernama State Law and Order Restoration Council (SLORC). Lembaga yang merupakan kaki tangan rezim militer sampai saat ini belum mampu menunjukkan peluang besar menuju rezim yang demokratis contohnya dalam kemenangan NLD dalam pemilu 1990 yang diabaikan begitu saja. tidak tahu apa-apa sebelum ada bukti yang cukup.

Dalam Konstitusi Myanmar tahun 2008 yang masih berlaku sampai sekarang, misalnya memberikan militer jaminan dengan 25% persen di kursi parlemen Myanmar. Konstitusi ini juga menyatakan setiap keputusan harus mendapatkan setidaknya 75% dari anggota parlemen Myanmar. Dengan demikian, bentuk keputusan legislatif Myanmar harus disetujui oleh Fraksi militer di parlemen untuk memenuhi syarat 75%, dan militer memiliki kesempatan untuk memveto semua keputusan. Konstitusi 2008 juga, memberikan kontrol militer kepada kementerian-kementerian utama seperti kementerian pertahanan, kementerian perbatasan, dan kementerian dalam negeri. Pengaruh militer yang kuat memiliki pengaruh terhadap birokrasi Myanmar dimana 90% persen pejabat publik dan 80% duta besar adalah mantan personel militer, sehingga iklim politik yang lebih demokratis akan sulit tercipta. Keterlibatan militer dalam kehidupan politik atau pemerintahan di atas memang sesuai dengan teori bahwa intervensi itu disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Dengan asumsi bahwa tentara memiliki tugas suci untuk menyelamatkan negara. Mengam Myanmar harus diselamatkan karena berbagai ancaman dari internal tetapi bisakah pendekatan militer menyelesaikan ancaman? Seseorang yang lebih dominan dalam kekerasan
2. Kepentingan sektor atau kelompok. Myanmar memiliki ideologi yang menarik ada 3 hal yaitu

non-disintegration of the Union, non-disintegration of National Solidarity, perpetuation of national sovereignty. Apakah ini benar-benar untuk kepentingan nasional atau sebagai kepentingan kelompok militer.

3. Militer merasa lebih penting (*self important motive*).
4. Harga diri militer yang kuat yang berkaitan dengan masalah pertahanan
5. Rasa superioritas militer atas sipil. Sipil dianggap belum efektif dan efisien dalam pemerintahan, padahal rezim sipil belum benar-benar cukup lama dalam menduduki pemerintahan. Sehingga militer sendirilah yang merasa sipil tidak tahu apa-apa sebelum ada bukti yang cukup.

Militer masuk ke dalam pemerintahan pertama sementara di tahun 1958-1960 dan sebagai kunci yang menentukan stabilitas jangka panjang dan persatuan militer baik sebagai lembaga dan pemerintah selama masa pemerintahan dalam politik Myanmar. 18 bulan pemerintahan sementara umumnya dipandang positif karena Tatmadaw dipandang kompeten dan efektif dalam menentang banyak faktor destabilisasi yang telah melanda negara itu sejak kemerdekaannya. Militer sangat jelas melihat dirinya secara historis sebagai pelindung negara yang paling efektif, setelah menolak pasukan kolonial Jepang, untuk menjadi pembangun aktif di negara Myanmar. Tantangan-tantangan kohesi inilah yang memberikan Tatmadaw fokus internal utamanya yang akhirnya mengarah keterlibatan langsung dan kontrol atas proses politik Myanmar. Sementara konflik internal terus merasionalisasi keterlibatan Tatmadaw dalam urusan internal sebagai penjamin persatuan negara. Dalam struktur komando dan kontrol militer Myanmar yang didasarkan pada komando regional, panglima militer menjadi sangat kuat karena ia mengawasi hampir semua aspek fungsi negara. Meskipun para kabinet menteri adalah perwira militer ruang lingkup kekuasaan yang diberikan sangatlah sedikit. Aspek negatif lain dari militer yaitu keterlibatan militer Myanmar dalam aspek ekonomi. Militer tentunya menyatakan perannya sebagai pembela kepentingan dalam semua aspek Myanmar khususnya aspek ekonomi yang mana militer menganggap politisi dan pihak swasta tidak kompeten dan terjerumus dalam keserakahan hingga korupsi.

Setelah pemilihan pada November 2010 junta militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang baru pada Maret 2011 sesuai dengan *Seven Stage Road Map to Democracy*. Militer menganggap pemandangannya sangatlah logis sehingga militer menugaskan dirinya sendiri semua peran dan fungsi sehingga militer sebagai entitas yang bersatu yang diberdayakan seperti itu akan melindungi kepentingan negara dengan sebaik-baiknya. Pimpinan militer Myanmar dengan cepat menangkalkan ancaman terhadap kohesi internalnya dengan mengambil tindakan serius terhadap setiap upaya untuk merusak kesatuannya.

Tatmadaw menganggap dirinya sebagai instrumen tunggal yang paling penting untuk memastikan “persatuan”, “semangat” rasa patriotisme yang perlu dijaga oleh semua kelompok etnis (kebangsaan) Myanmar. Dalam kata-kata mereka, “pohon buah-buahan dan tanaman berbunga di kebun hanya tumbuh dengan baik di bawah pekerjaan pengasuhan tukang kebun yang kompeten”.

MYANMAR DAN MATINYA DEMOKRASI DI TAHUN 2020

Militer junta tentunya membuat sejarah yang sebelumnya terjadi terulang kembali hal ini junta militer mengumumkan darurat satu tahun pada Senin 1 Februari 2021. Tatmadaw militer Myanmar menunjuk seorang jenderal sebagai pelaksana tugas (plt) Presiden Myanmar melalui siaran langsung di *Myawaddy TV* milik militer. menjaga kestabilan negara sebagai tindakan yang dilakukan oleh Myanmar. Militer menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020. Dalam minggu-minggu setelah kudeta 1 Februari, Tatmadaw memulai kampanye untuk meredam protes dan perbedaan pendapat lainnya, begitu banyak komunitas dan kelompok pengunjuk rasa di seluruh Myanmar mulai membentuk milisi untuk melindungi diri mereka dari kekerasan rezim dan melancarkan perlawanan bersenjata. Dengan mengambil kekuasaan Myanmar dari pemerintahan sipil oleh militer, satu dekade sesudah setuju menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Militer mengambil ahli kekuasaan dengan kudeta dengan beralasan pemilihan yang dilakukan curang tanpa adanya bukti. Kudeta ini menimbulkan ketakutan luar biasa di seluruh negeri karena sebelumnya diperintah oleh rezim militer opresif selama hampir 50 tahun. Militer mengklaim kudeta itu sah di bawah konstitusi, yang memungkinkan untuk mengambil-ahli kekuasaan darurat pada saat krisis nasional. Pada tanggal 17 November Komisi Pemilihan umum mengumumkan hasil pemilihan yang lebih cepat biasanya seperti di tahun 2015. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa memenangkan pemilihan ini dengan hasil 920 (82%) dari 1.117 kursi yang diperebutkan. Sementara itu, partai yang didukung militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang didukung militer, mengumpulkan 71 (6%) kursi, sedangkan 17 partai politik etnis memenangkan total 122 kursi, dan kandidat independen memenangkan total empat kursi. Setelah pemilihan umum Ketua Partai Solidaritas dan Pembangunan U Than Htao menuduh adanya penyimpangan dalam proses pemungutan suara, seperti pembentukan komisi pemilihan di desa dan kelurahan, instruksi pemilihan, dan waktu yang tidak mencukupi bagi partai untuk berkampanye. Militer berulang kali mempersalahkan hasil pemilu dengan mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa ada lebih dari 10,5 juta kasus potensi penipuan, seperti pemilih yang tidak ada, dan meminta komisi pemilihan umum untuk terbuka merilis data pemungutan suara akhir. Militer berulang kali

mempersalahkan hasil pemilu dengan mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa ada lebih dari 10, 5 juta kasus potensi penipuan, seperti pemilih yang tidak ada, dan meminta komisi pemilihan umum untuk terbuka merilis data pemungutan suara akhir. Dalam pidato melalui televisi militer, tentara mengatakan telah menahan Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya karena gagal mengambil tindakan atas kecurangan pemilu yang tidak berdasar dan telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Kekuasaan dialihkan ke panglima tertinggi Min Aung Hlaing, yang akan melakukan penyelidikan atas ketidakberesan pemungutan suara, menurut pengumuman tersebut.

Dalam pidato melalui televisi militer, tentara mengatakan telah menahan Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya karena gagal mengambil tindakan atas kecurangan pemilu yang tidak berdasar dan telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Kekuasaan dialihkan ke panglima tertinggi Min Aung Hlaing, yang akan melakukan penyelidikan atas ketidakberesan pemungutan suara, menurut pengumuman tersebut. Rezim militer telah mencabut hasil pemilihan umum tahun lalu, dimana partai penasihat negara Aung San Suu Kyi yang sekarang telah ditahan militer mengklaim pemilihan pada saat itu “tidak bebas dan tidak adil” serta tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum. Pembatalan resmi hasil pemilu tidak lebih dari pembenaran lain yang dicoba oleh militer pada kudeta bulan february dan langkah lain untuk membubarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) diduga melakukan kecurangan pemilihan. Pengumuman oleh Komisi Pemilihan (UEC) yang dikendalikan rezim datang setelah hampir enam bulan penyelidikan terhadap daftar pemilih dan kertas suara di 315 kota di negara itu. Tinjauan tersebut diperintahkan oleh pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

3. KESIMPULAN

Myanmar telah mengalami begitu banyak permasalahan politik hingga saat ini. Pasang surut demokrasi di Myanmar tentunya tidak lepas dari adanya hubungan sipil dan militer. Pemilihan umum pada tahun 2020 harusnya menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Myanmar. Akan tetapi, pemilihan ini mengulang kembali masa kelam yang pernah terjadi di Myanmar. Kemenangan partai Nasional Liga Demokrasi tentunya menjadi pemicu dalam pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh militer pada february 2021 yang mengakibatkan penangkapan pejabat tinggi pemerintahan termasuk petinggi partai NLD yaitu Aun San Suu Kyi. Militer menuduh adanya kecurangan sehingga melancarkan aksinya hingga memicu sejumlah protes dari masyarakat Myanmar hingga hasil pemilihan pun dibatalkan. Dalam konstitusi Myanmar pada tahun 2008, militer mendapatkan 25% kursi parlemen sehingga militer mengambil andil dalam 75% keputusan parlemen. Pengalihan kekuasaan kembali terjadi yang dilakukan oleh militer tentunya militer masih melekat

dalam sistem pemerintahan Myanmar karena adanya celah dari pemerintahan sipil membuat militer bergerak dan tidak percaya terhadap sipil. secara historis, Myanmar mengalami berbagai tantangan demokrasi padahal demokrasi Myanmar telah dimulai sejak tahun 1922 pada saat Inggris menjajah Myanmar. Myanmar sebenarnya mampu untuk menjalankan demokrasi apalagi saat ini dimana era modern yang harusnya kudeta tidak terulang kembali. Sipil dan militer harus memiliki kerjasama dan saling satu percaya apalagi dalam menghadapi permasalahan internal dan maupun eksternal. Pembelajaran bagi Myanmar yang masih perlu diasah akan demokrasi yang dapat tercipta pemerintahan yang baik kedepan.

Daftar Pustaka

- Batubara, P.E.O. (2017). *Peran dan Upaya Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar (Studi : dari masa kekuasaan Junta Militer 1988 hingga tahun 2012)*. (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2017). Retrived : <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17211/130906061.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Budiardjo, M . 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Clapp, P. (2015). *Myanmar: Anatomy of a Political Transition*. US Institute of Peace. <http://www.jstor.org/stable/resrep12370>
- Dahl, R.A (1998), On Democracy, USA, Yale University Press, hlm. 120. Dikutip : Kusnu Goesniadhie S . (2009). Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat Manusiawi. *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi*, 1(1), , hal. 29-30.
- Devi, K.. (2014) .Myanmar under the military rule 1962-1988. *International Research Journal of Political Science* . 3 (10) ,pp 47
- Gunawan, A. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*. Vol, 2. No, 2.
- Hnin Yi. (2014.0 The Political Role of the Military in Myanmar. School of Asia Pacific Studies. : Kyoto
- Holliday, I. (2008). Voting and Violence in Myanmar: Nation Building for a Transition to Democracy. *Asian Survey*, 48(6), 1038–1058. <https://doi.org/10.1525/as.2008.48.6.1038>
- Ita Mutiara, D. (2005). Pengalaman militer Burma : Sebuah Analisis Historis – Politis. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah ISTORIA*. 1(2)

- Kardi, K. (2014). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. Masyarakat.: *Jurnal Sosiologi* , 19(2), Juli 2014: 231-256.
- Kingsbury, D (2014). Political Transition in Myanmar: Prospects and Problems. *Asian Politics & Policy*, 6(3), 351–373. doi:10.1111/aspp.12115
- Le Thu, H., & Pascoe, A. (Eds.). (2020). Indo-Pacific election pulse 2020: Taiwan, Singapore, New Zealand, Myanmar and the United States: Views from The Strategist. Australian Strategic Policy Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep27716>
- Le Thu, H., & Pascoe, A. (Eds.). (2020). *Indo-Pacific election pulse 2020: Taiwan, Singapore, New Zealand, Myanmar and the United States: Views from The Strategist*. Australian Strategic Policy Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep27716>
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian pendidikan IPA. *Artikel Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*. 6(1)
- Mirajiah, Risalatu. (2013). Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 9(2).
- Ni“matul Huda. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- The Asian Network for Free Elections. (2021) *.Under Democracy Under Attack ANFREL international Election Observation Mission Report*. Bangkok: The Asian Network for Free Elections
- UK Parliamentary. (2021). *Myanmar: 2020 parliamentary election*. London : UK Parliamentary
- Vivekananda International Foundation. (2013). *The role of Myanmar’s Military in Democratic Transition and Implications for India*. New Delhi : Vivekananda International Foundation.
- Artikel & Berita Online**
- . Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu. (2020, November 13). <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54928325> diakses tgl 21/09/2021, 12:04
- ANFREL. History of elections in Myanmar <https://myanmar.anfrel.org/en/media-toolkit/history-of-elections-in-myanmar> diakses tgl 21/09/2021, 12:04
- BBC News Indonesia. 2021. “Aung San Suu Kyi dan kudeta Myanmar: Ikon demokrasi yang reputasinya jatuh akibat krisis Muslim Rohingya.” <https://tirto.id/sejarah-membuktikan-militer-myanmar-memang-gatal-kudeta-f91X> , diakses tgl, 21/09/2021, 19:59
- Dunia Tempo. 2020. “Kemenangan Partai NLD Aung San Suu Kyi Cukup untuk Membentuk Pemerintahan”.<https://dunia.tempo.co/read/1405068/kemenangan-partai-nld-aung-san-suu-kyi-cukup-untuk-membentuk-pemerintahan/full&view=ok> diakses tgl 24/10/2021, 12:04
- <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b170-deadly-stalemate-post-coup-myanmar> diakses tgl 13/12/2021, 12:04
- <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-officially-annuls-nlds-2020-election-win.html> diakses tgl 23/10/2021, 12:45
- <https://www.kompas.com/global/read/2021/02/01/102544870/militer-myanmar-ambil-alih-kekuasaan-dan-kepung-yangon-umumkan-keadaan> diakses tgl 14/12/2021, 12:04
- <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/08/nxh69s330-myanmar-gelar-pemilu-pertama-dalam-25-tahun-terakhir> diakses tgl 21/09/2021, 13:04
- <https://www.tagar.id/kudeta-myanmar-tuduhan-pemilu-curang-ala-donald-trump> diakses tgl 24/10/2021, 14:04
- Iis.Fisipol.UGM.2021. “Military Coup 2021 and the Stalemate of Democratization Process in Myanmar”. <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2021/02/03/military-coup-2021-and-the-stalemate-of-democratization-process-in-myanmar/> diakses tgl 12/12/2021, 12:04
- Republik.co.id. 2021. “Myanmar dan Sejarah Panjang Junta Militernya.”. <https://www.republika.co.id/berita/qo5u4m284/myanmar-dan-sejarah-panjang-junta-militernya-part1> diakses tgl 21/09/2021, 13:05